

**MOTIF INDONESIA DALAM PEMBERIAN BANTUAN  
LUAR NEGERI KEPADA ETNIS ROHINGYA DI ERA  
JOKOWI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**KEMAS FRASYA ANANTA PUTRA  
07041382025178**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“MOTIF INDONESIA DALAM PEMBERIAN BANTUAN LUAR  
NEGERI KEPADA ETNIS ROHINGYA DI ERA JOKOWI”**

**Skripsi**

**Oleh :**

**KEMAS FRASYA ANANTA PUTRA**

**07041382025178**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 24 Januari 2024**

Pembimbing :

1 Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

2 Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., M.A  
NIP. 199408152023212040

Penguji :

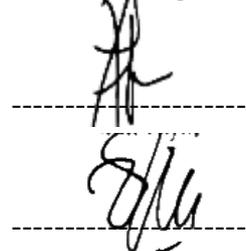
1 Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A.  
NIP. 199104092018032001

2 Yuni Permatasari, S.IP., M.HI  
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



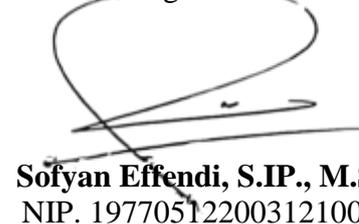
Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemas Frasya Ananta Putra  
NIM : 07041382025178  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 13 Mei 2002  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Motif Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri  
Kepada Etnis Rohingya Di Era Jokowi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,



**Kemas Frasya Ananta Putra**  
**NIM. 07041382025178**

## ABSTRAK

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok etnis paling sensitif di dunia akibat kekerasan yang dialami kelompok etnis ini di wilayahnya oleh pemerintah Myanmar. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mendukung dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia, serta menjadi pemimpin di Asia Tenggara, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berusaha menunjukkan partisipasinya dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dengan berbagai upaya yang mengedepankan kemanusiaan dan perdamaian, seperti bagaimana mengelola politik luar negeri dengan diplomasi, serta alokasi bantuan luar negeri dengan fokus kemanusiaan yang terutama diberikan kepada masyarakat dari kelompok etnis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada topik penelitian penulis secara jelas dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada penelitian ini. Metode kepustakaan digunakan pada pengumpulan data penelitian ini untuk menggali lebih dalam informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui sumber-sumber yang ada, dimana informasi yang diperoleh tersebut dapat dianalisis penulis. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, video, surat kabar, majalah, dan berbagai data terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini menemukan hasil riset, yaitu bantuan luar negeri Indonesia meliputi 4 motif bantuan luar negeri, yaitu motif seperti moral & kemanusiaan, keamanan politik/nasional, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pada kemanusiaan, bantuan yang diberikan didasari oleh rasa kemanusiaan yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada Keamanan Nasional, Indonesia didasari oleh keinginan untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya dikarenakan derasnya gelombang pengungsi. Pada ekonomi, Indonesia mencoba untuk meningkatkan hubungan ekonomi dibalik bantuan tersebut dan juga menjaga stabilitas ekonomi akibat krisis kemanusiaan ini. Pada lingkungan hidup, Indonesia ingin memastikan lingkungan wilayah negaranya tetap aman.

**Kata Kunci:** Rohingya, Bantuan Luar Negeri, Bebas-Aktif, Kemanusiaan, Genosida, Kepentingan Nasional

Pembimbing 1



Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

Pembimbing 2



Maudy Nobr Fadhlia, S.Hub.Int., MA  
NIP. 199408152023212040



## ABSTRACT

The Rohingya ethnic group is one of the most sensitive ethnic groups in the world due to the violence experienced by this ethnic group in its territory by the Myanmar government. Indonesia, as one of the countries that supports and advances human rights values, as well as being a leader in Southeast Asia, under Jokowi's leadership, Indonesia is trying to show its participation in efforts to resolve the conflict. with various efforts. which prioritizes humanity and peace, such as how to manage foreign policy with diplomacy, as well as the allocation of foreign aid with a humanitarian focus which is mainly given to people from these ethnic groups. This research uses qualitative methods to clearly describe events that occurred on the author's research topic and to answer the research questions in this study. The library method is used in collecting research data to dig deeper into information related to the research topic through existing sources, where the information obtained can be analyzed by the author. This research also uses secondary data from various sources such as books, journals, articles, websites, videos, newspapers, magazines, and various data related to research problems. This research found research results, namely that Indonesian foreign aid includes 4 motives for foreign aid, namely motives such as moral & humanitarian, political/national security, economic and environmental. In terms of humanity, the assistance provided is based on the sense of humanity that Indonesia has as a country that upholds human rights. In National Security, Indonesia is based on the desire to maintain the stability of the country's security due to the large influx of refugees. On the economy, Indonesia is trying to improve economic relations behind this aid and also maintain economic stability due to this humanitarian crisis. Regarding the environment, Indonesia wants to ensure that the country's territorial environment remains safe.

**Keyword:** Rohingya, Foreign Aid, Bebas-Aktif, Humanitarian, Genocide, National Interest

Advisor 1



Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

Advisor 2



Maudy Noor Fadhila, S.Hub.Int., MA  
NIP. 199408152023212040



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Retno Susilowati, MM dan Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukan, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A dan Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis;
3. Kedua orang tua penulis, KMS. Ibrahim dan Mena Lukman, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
4. Saudara penulis yang selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan lmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun atas kekurangannya.

Palembang, 10 Januari 2024

Penyusun,



Kemas Erasya Ananta Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri.....	16
2.2.2 <i>Theories of Aid Allocation</i> (Teori Alokasi Bantuan).....	18
2.2.3 <i>National Interest</i> (Kepentingan Nasional).....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
2.4 Argumentasi Utama.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Definisi Konsep.....	23

3.2.1 Bantuan Luar Negeri.....	23
3.2.2 Etnis Rohingya.....	23
3.2.3 Motif.....	24
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Unit Analisis.....	29
3.5 Jenis Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	31
3.9 Jadwal Penelitian.....	31
3.10 Sistematika Penelitian.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Krisis Kemanusiaan Rohingya.....	33
4.2 Kebijakan Luar Negeri Indonesia.....	37
4.2.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif.....	37
4.3 Bantuan Luar Negeri Indonesia.....	39
<b>BAB V HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri Kepada Rohingya.....	43
5.2 Motif-Motif Indonesia Dibalik Pemberian Bantuan Luar Negeri Kepada Rohingya.....	44
5.2.1 Motif Moral dan Kemanusiaan.....	44
5.2.2 Motif Keamanan Politik/Nasional.....	48
5.2.3 Motif Ekonomi.....	51
5.2.4 Motif Lingkungan Hidup.....	53
5.3 National Interest.....	55
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
1. Kesimpulan.....	57

2. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	24

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5. 1 Peluncuran Program Bantuan Kemanusiaan bagi Myanmar .....	41
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
AKIM	: Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HASCO	: <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community</i>
IHA	: <i>Indonesian Humanitarian Assistance</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### *1.1* Latar Belakang

Pasca berakhirnya Perang Dingin, bermunculan berbagai bentuk dan aktor yang memunculkan permasalahan/konflik yang jika dilihat justru lebih berbahaya dan mengkhawatirkan. Salah satunya ibarat sebuah negara yang tidak lagi berkonflik dengan negara lain, namun berada dalam kondisi membunuh, menyiksa, melukai bahkan melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri, yang secara sah menjadi warga negaranya. Contoh permasalahan yang muncul adalah krisis kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan merupakan fenomena yang terus bermunculan. Meski dunia telah memasuki abad sekarang ini, krisis kemanusiaan masih terus memberikan dampak terhadap umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi dimana hak-hak dasar manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman dan hak memperoleh keadilan tidak dapat diperoleh oleh seorang individu (Sawal, 2017).

Penyebab krisis kemanusiaan seringkali disebabkan oleh konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berkonflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antar kelompok tersebut. Baik itu perbedaan suku, ras, maupun agama. Selain itu, penyebab terjadinya krisis kemanusiaan ini karena pemerintah terkait tidak mempunyai kemauan yang kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik internal seperti ini sepertinya pernah terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, bahkan PBB telah menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah kelompok yang paling tertindas di dunia (Sundari, Prayuda, & Sary, 2021). Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya merupakan konsekuensi dari perlakuan diskriminatif yang diterapkan pemerintah Myanmar.

Pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai tindakan diskriminatif, mulai dari pengusuran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, pemerkosaan, propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, kerja paksa, pembatasan pergerakan, pembatasan kesempatan kerja, hingga pelarangan melakukan kegiatan agama, dan tidak menerima Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 (Wanadi, Diantha, & Arsika, 2015).

Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan ini juga merupakan akibat dari operasi militer yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar sebagai bentuk pembalasan atau pendisiplinan terhadap etnis Rohingya yang melanggar norma yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar.

Keterlibatan militer dalam pengusiran warga Rohingya nampaknya menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan legitimasi kepada kelompok Rakhine untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Tindakan kekerasan atau penggunaan aspek koersif oleh institusi negara bukanlah hal baru dan merupakan cara beberapa negara untuk mengurangi segmen penduduknya (Wardhani, 2012).

Akibat kekerasan yang terus terjadi terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Myanmar, beberapa warga Rohingya memutuskan untuk meninggalkan negaranya menuju negara Asia lainnya, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan yang sangat mengutamakan perdamaian dunia, hal ini tertuang dalam UUD 1945 dengan landasan bahwa politik luar negerinya bersifat bebas aktif yang bersumber dari UUD 1945 yang secara rinci terdapat pada alinea keempat yang secara singkat berbunyi “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hal ini sudah dilakukan sejak lama, seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dll. yang kemudian menjelaskan di forum

internasional seperti PBB tentang arah politik Indonesia yang tidak berpihak pada kelompok sayap kanan maupun sayap kiri dan terlibat aktif dalam pelaksanaan perdamaian dunia, salah satunya menyangkut persoalan kemanusiaan.

Sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara, ASEAN tidak bisa berbuat banyak dalam konflik ini karena prinsip non-intervensi yang dianutnya. Maka mau tidak mau, salah satu negara anggota harus berusaha memainkan peran khusus dalam masalah kemanusiaan ini. Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim juga turut prihatin dengan situasi ini, tercermin dari peran aktif Indonesia dalam memantau dan juga menyikapi permasalahan ini, misalnya dengan memberikan bantuan luar negeri secara intensif kepada kelompok etnis tersebut (Zahidi, 2015).

Namun negara tujuan pengungsi Rohingya awalnya menolak kehadiran mereka, termasuk Indonesia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan wilayah lautnya diserbu kapal pengungsi Rohingya. Menurutnya, bantuan akan terus diberikan kepada pengungsi yang diusir dari Myanmar, namun mereka akan terus dilarang masuk apalagi tinggal di daratan Indonesia (Asril, 2015).

Konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar saat ini akan terus mempengaruhi pembangunan di Asia Tenggara. Hal ini termasuk melakukan perubahan Agenda Komunitas ASEAN yang mencakup aspek ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Jadi stabilitas politik dan keamanan di Myanmar sangat menentukan aktivitas ekonomi dan politik di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ancaman yang akan dihadapi pun tak kalah dahsyatnya, mulai dari perdagangan manusia, terorisme dan peredaran narkoba, hingga kemungkinan terjadinya perang saudara.

Dalam konteks bilateral, krisis Rohingya juga dapat merusak stabilitas dan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Myanmar. Sejauh ini hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Myanmar terus berjalan cukup baik. Banyak program yang terus

dilaksanakan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Namun, jika konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar tidak terselesaikan serta situasi politik dan keamanan yang masih belum stabil, hal ini dapat mengancam stabilitas hubungan dan kerja sama keduanya.

Indonesia dan beberapa negara di kawasan memandang krisis Rohingya dalam konteks kepedulian terhadap umat manusia lainnya. Oleh karena itu, ketidakpastian nasib para pengungsi Rohingya membuat khawatir pemerintah Indonesia, serta negara-negara di kawasan yang secara geografis dekat dengan Myanmar. Di sisi lain, tentunya Indonesia dan negara-negara kawasan yang berbatasan langsung dengan Myanmar akan melindungi negaranya, khususnya di wilayah perbatasan, agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh pengungsi terlantar, seperti perdagangan manusia, dan lain-lain.

Namun setelah mendapat kritik dari dunia internasional dan permintaan dari PBB, ketiga negara tersebut akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menampung pengungsi Rohingya di negaranya masing-masing. Malaysia dan Indonesia pada Rabu 20 Mei 2015 menyatakan bersedia menerima pengungsi Rohingya yang terdampar di tengah laut ke wilayah perairan mereka. Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri kedua negara usai melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri Thailand di Putrajaya, Malaysia (Pasuhuk, 2015).

Penolakan Indonesia sendiri sebelumnya merupakan bentuk keamanan terhadap wilayahnya. Namun Indonesia sendiri mempunyai kebijakan luar negeri yang terbuka terhadap para pengungsi tersebut karena pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaannya adalah keamanan manusia (human security) bukan keamanan nasional (national security), sehingga Indonesia menganggap kebijakan luar negerinya bersifat people-centric, dalam hal ini pengungsi Rohingya. Menerima kelompok etnis ini

merupakan sesuatu yang penting karena kelompok etnis ini banyak menerima ancaman dari dalam negaranya (Listiarani, 2021).

Menyikapi konflik yang terjadi di kalangan etnis Rohingya, maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai Local Great Power di Asia Tenggara menjadi penting, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan. negara mereka setelah gelombang pengungsi etnis yang tiba di Indonesia.

Ketertarikan Indonesia terhadap politik luar negeri melalui diplomasi dan juga bantuan luar negeri yang berorientasi pada kemanusiaan bagi para peneliti sendiri tidak lepas dari hal-hal seperti jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam membantu masyarakat atau etnis Rohingya akibat penindasan dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok lainnya di Myanmar, serta keberadaan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Dan kepentingan Indonesia lainnya adalah menjaga hubungan bilateral baik yang sudah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Myanmar (Djumati, Lengkong, & Tulung, 2020).

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengambil kebijakan untuk respons terhadap konflik kelompok etnis Rohingya, yang kemudian mewakili kebijakan bebas aktif yang dianut Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada kepentingan negara-negara besar dalam konflik Myanmar, dan upaya serta sikap Indonesia juga dilakukan dengan sepenuh hati dalam melaksanakan politik luar negerinya melalui komisi yang tinggi dan stabil dalam memperjuangkan penyelesaian masalah Rohingya di Burma (Zainullah, 2019).

Indonesia sangat memperhatikan melalui pemberian bantuan kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan luar negeri untuk krisis kemanusiaan konflik etnis Muslim Rohingya. Indonesia sendiri juga berkepentingan dengan hal ini, selain sebagai representasi UUD

1945 yakni turut berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dunia, persoalan ini juga ada di kawasan Asia Tenggara yang jika tidak segera diatasi, akan berdampak pada keamanan regional (Sundari, Prayuda, & Sary, Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar, 2021).

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan simpati atas penderitaan yang dialami etnis Muslim Rohingya atau bisa dikatakan sebagai rasa solidaritas antar umat Islam yang kemudian menjadi faktor internal dalam aktivitas politik luar negeri Indonesia di era Jokowi (kepentingan nasional), selain implementasi UUD 1945. Lebih lanjut, selain faktor kepentingan nasional, Indonesia yang merupakan anggota ASEAN merasa perlu untuk segera mengatasi konflik ini. Hal ini dimungkinkan karena ASEAN, menurut masyarakat internasional, belum sepenuhnya mampu melakukan upaya penyelesaian krisis kesejahteraan etnis Rohingya (Djumati, Lengkong, & Tulung, 2020).

Pemerintah Indonesia sendiri dalam konflik ini memosisikan dirinya sebagai pihak ketiga yang dapat berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik, baik dari sudut pandang pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, Indonesia harus terus menempuh kebijakan yang dapat mengikutsertakan Myanmar (Rosyid, 2019).

Pada dasarnya langkah pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Menurut Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto, pemerintah menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menerapkan sistem internasional, termasuk menyikapi peristiwa kekerasan di Myanmar (Erdianto, 2017).

Adanya prinsip politik bebas aktif menunjukkan pola tindakan yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi terkait konflik Rohingya dengan pihak-pihak terkait.

Bebas aktif memungkinkan Indonesia mencapai kepentingan nasional melalui upaya diplomasi tanpa memihak kubu tertentu dan tetap mengupayakan perdamaian dunia sebagai kepentingan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam UUD (Indrawati & Nugroho, 2019).

Indonesia yang dikenal dengan kebijakan bebas aktif dan juga dianggap sebagai pemimpin ASEAN, merupakan aktor yang tepat untuk mengatasi konflik regional ini. Indonesia yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip politik luar negerinya sejak awal kemerdekaannya, telah diperbolehkan untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik dan juga memberikan bantuan terkait konflik tersebut. Asas bebas aktif ini juga memungkinkan Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, yakni mencapai perdamaian dunia tanpa memihak pihak manapun (Sundari, Prayuda, & Sary, 2021).

Buktinya, Indonesia tetap mampu menjalin hubungan bilateral dengan Myanmar dengan baik dengan tetap memperhatikan etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Melalui kebijakan bebas aktifnya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan bantuan luar negeri dan juga diplomasi sebagai wujud kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, dengan tujuan mencapai perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi Myanmar dalam kompleksnya dan bagi etnis Rohingya khususnya dapat dicapai (Alam & Purwanto, 2021).

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan alasan peran yang dilakukan Indonesia melalui kebijakan yang diterapkannya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, seperti melalui diplomasi dan pemberian bantuan luar negeri kepada kelompok etnis Rohingya di era Jokowi, dimana Indonesia berada. negara yang menjunjung nilai-nilai perdamaian dunia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembaca lebih memahami motivasi suatu negara dalam memberikan bantuan luar negeri, serta diharapkan dapat memberikan

manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hubungan internasional sebagai bahan penambah pengetahuan tentang pembelajaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Peneliti dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai “Motif apakah yang menjadi alasan Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Etnis Rohingya di era Jokowi?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah menjelaskan faktor-faktor/motif-motif yang mempengaruhi Indonesia dalam pemberian bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya yang mengalami krisis kemanusiaan di Myanmar.
- 1.3.2 Memberikan pemahaman mengenai manfaat di belakang motif Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan uraian tentang motif Indonesia di era Jokowi, khususnya dalam bantuan luar negeri Indonesia terhadap Rohingya. Hal ini menjadi penting bagi mahasiswa dengan minat dan fokus studi pada kajian ilmu sosial dan politik untuk dapat mengidentifikasi motif-motif apa saja yang dipertimbangkan Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri khususnya yang berkaitan erat dengan krisis kemanusiaan di Myanmar. Sehingga, selanjutnya, dapat mendalami, mengembangkan atau bahkan membantah temuan yang dihasilkan dari penelitian ini melalui penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi Peneliti, Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai motif dari bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia dan pelaksanaannya dalam dunia internasional dan Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan dalam dunia kerja.
- 1.4.2.2 Bagi pembaca, Melalui Penelitian skripsi ini semoga pembaca dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Selain itu juga dapat mengetahui bagaimana politik luar negeri bebas aktif diimplementasikan dalam suatu konflik dunia.
- 1.4.2.3 Bagi Universitas, Skripsi ini diharapkan mampu menambah dan melengkapi karya ilmiah yang telah ada terutama yang sangat berkaitan dengan sejarah hubungan internasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, I. F., & Purwanto, A. J. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmiah "Kajian Hubungan Internasional" Universitas Wahid Hasyim*.
- Ardani, F. A., Wahyudi, F. E., & Susetianingsih, H. (2015). Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono). *Diponegoro Journal of International Relations*, 1(2), 22-28.
- Alexandra, L. A. (2017). Offering Support and Sharing Experiences: Indonesia's Approach to Peacebuilding.
- Alexandra, L. A., & Lanteigne, M. (2017). New Actors and Innovative Approaches to Peacebuilding: The Case of Myanmar.
- Andersson, M. (2011). Motives behind the Allocation of Aid - A Case Study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation.
- Apriyanti, D. (2014). Reformasi Politik Dan Ekonomi Di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). *Jurnal Transnasional*.
- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public*.
- ASEAN. (2020). *Indonesia funds US\$500,000 to support ASEAN efforts in the repatriation of displaced persons in Myanmar*.
- Asril, S. (2015, Mei 15). *Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan*. Dipetik Oktober 19, 2023, dari Kompas.com Web Site: <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>
- Baiduri, M. N. (2017). *Menteri Retno Akan Serahkan 10 Kontainer Bantuan untuk Myanmar*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/837355/menteri-retno-akan-serahkan-10-kontainer-bantuan-untuk-myanmar>
- BBC. (2015). *Partai Suu Kyi Dinyatakan Menang Mutlak*. Retrieved from [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151113\\_dunia\\_suukyi\\_pasti\\_menang](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151113_dunia_suukyi_pasti_menang)
- BBC. (2017). *Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui*. BBC.
- Bonasir, R. (2017). *BBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41226417>
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*.

- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar.
- Erdianto, K. (2017, September 6). *Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan Buddha*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/06410621/jangan-lihat-isu-rohingya-sebagai-konflik-antara-islam-dan-buddha?page=all>
- Hanifa, F. (2023, Desember 19). *Pengungsi Rohingya, Solidaritas, dan Tantangan Ekologis*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d-7096093/pengungsi-rohingya-solidaritas-dan-tantangan-ekologis>
- Hasugian, M. R. (2014). *Jokowi: Indonesia Investasi 3 Sektor di Myanmar*. Retrieved from tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/621420/jokowi-indonesia-investasi-3-sektor-di-myanmar>
- Indrawati, & Nugroho, A. Y. (2019). Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Jati, I. (2017). Comparative study of the roles of ASEAN and the organization of Islamic cooperation in responding to the Rohingya crisis. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State*
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Menlu Retno tekankan keprihatinan Indonesia saat bahas situasi Rakhine State dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi*.
- Krisman, K. (2013). Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar.
- Listiarani, T. (2021). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi. *Journal PIR*.
- Ludfiani, A., Hara, A. E., & Sunarko, B. S. (2017). Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember*.
- Martinussen, J. D., & Pedersen, P. E. (2003). *AID : Understanding International Development Cooperation*. London & New York: Zed Books Ltd.
- Maulana, V. (2017). *Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar*. Retrieved from SINDONEWS.COM: <https://international.sindonews.com/berita/1235597/40/menlu-retno-luncurkan-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar>
- Mazrieva, E. (2017). *Bantu Atasi Krisis Rohingya, Menlu RI Sampaikan Usul 4+1*. VOC Indonesia.
- Nurhandayani, D. (2013). Kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyelesaian kekerasan etnis muslim Rohingya di Myanmar.

- Pasuhuk, H. (2015, Mei 20). *Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi*. Dipetik Oktober 19, 2023, dari DW Made For Minds Web Site: <https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889>
- Putra, K. A., Yuliantini, N. R., & Mangku, D. G. (2018). Analisis Tindak kejahatan genosida oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Sadewa, D. P., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Saragih, H. M. (2017). Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 106-24.
- Satria, N., & Jamaan, A. (2013). Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine Myanmar.
- Sawal, I. A. (2017). Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar Terhadap Negara-negara ASEAN. *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 1.
- Siba, M. A., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics*.
- Sundari, R., Prayuda, R., & Sary, D. V. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 178.
- Umar, A. R. (2014). The National Interest in International Relations Theory: Book Review. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Wanadi, G., Diantha, I. M., & Arsika, I. M. (2015). Perlakuan Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya Oleh Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Universitas Udayana*, 1-2.
- Wardah, F. (2017). *Indonesia Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan bagi Myanmar*. VOA Indonesia.
- Wardhani, B. (2012). No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar. *Jurnal Global dan Strategi*.
- Yi, H. (2014). The Political Role of the Military in Myanmar. *RCAPS Working Paper Series "Dojo"*.
- Zahidi, M. S. (2015). Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan. *Journal of International Relations*.
- Zainullah, H. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas Aktif" Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya. *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*.